

Pendekatan Integratif dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan: A Literature Review

¹Hasyati Shabrina, ²Febriana Tri Wulandari

¹² Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Jalan Pendidikan no.37

Mataram Nusa Tenggara Barat

*Corresponding Author e-mail: febrianawulandari@unram.ac.id

Received: January 2026; Revised: February 2026; Published: February 2026

Abstrak

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, serta model implementasi pengembangan masyarakat berbasis potensi lokal yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis berbagai buku, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan hasil penelitian terkait pengembangan masyarakat. Analisis difokuskan pada berbagai pendekatan pemberdayaan, seperti pendekatan partisipatif, Asset-Based Community Development (ABCD), agroforestri, perhutanan sosial, ekowisata berbasis komunitas, serta transformasi digital desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh penguatan kelembagaan lokal, akses legal terhadap sumber daya, peningkatan kapasitas sosial dan digital masyarakat, serta keterlibatan kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Berbagai model implementasi tersebut terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, beberapa tantangan struktural seperti konflik lahan, patronase politik, dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui transparansi, partisipasi aktif masyarakat, serta pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat berbasis partisipasi dan potensi lokal menjadi pendekatan strategis dalam menciptakan pembangunan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pengembangan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Keberlanjutan, Agroforestri, Perhutanan Sosial, Partisipasi

Integrative Approaches in Community Development and Empowerment for Sustainable Development: A Literature Review

Abstract

Community development and empowerment are important strategies for achieving inclusive and sustainable development. This study aims to analyze the concepts, principles, and implementation models of local potential-based community development that integrate social, economic, cultural, and ecological aspects. The method used is descriptive qualitative research with a literature study approach through analysis of various books, scientific articles, policy reports, and research findings related to community development. The analysis focuses on various empowerment approaches, such as participatory approaches, Asset-Based Community Development (ABCD), agroforestry, social forestry, community-based ecotourism, and village digital transformation. The results of the study indicate that the success of community empowerment is influenced by strengthening local institutions, legal access to resources, increasing community social and digital capacity, and the involvement of women's groups, youth, and indigenous communities in the development process. These various implementation models have been proven to increase community income, strengthen social resilience, and maintain environmental sustainability. However, several structural challenges such as land conflicts, political patronage, and dependence on external aid remain obstacles that need to be addressed through transparency, active community participation, and ongoing mentoring. Therefore, community development based on participation and local potential is a strategic approach in creating independent, inclusive, and sustainable development.

Keywords: Community Development, Community Empowerment, Sustainability, Agroforestry, Social Forestry, Participation

How to Cite: Wulandari, F. T., & Shabrina, H. . (2026). Pendekatan Integratif dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan: A Literature Review. *Journal of Authentic Research*, 5(1), 1042-1056. <https://doi.org/10.36312/j55z4d82>



<https://doi.org/10.36312/j55z4d82>

Copyright© 2026, Shabrina & Wulandari

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

(Carmen et al., 2022) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan global telah mengalami perubahan signifikan dari pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas hidup manusia, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan (Adamowicz, 2022; Zhironkin & Cehlár, 2022). Perspektif ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan, bukan sekadar sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga pembangunan. Dalam kerangka ini, pembangunan dipahami sebagai proses peningkatan kebebasan manusia untuk menentukan pilihan hidup mereka secara mandiri dan bermartabat (Sen, 1999). Oleh karena itu, pengembangan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, kelembagaan lokal, serta kemampuan komunitas untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Meskipun paradigma pembangunan partisipatif semakin banyak diadopsi dalam kebijakan pembangunan di berbagai negara, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satu masalah fundamental adalah masih dominannya pendekatan pembangunan yang bersifat top-down, di mana masyarakat sering kali hanya dilibatkan secara simbolis dalam proses perencanaan Pembangunan (Handoko et al., 2023). Program pembangunan sering dirancang berdasarkan perspektif pemerintah atau lembaga donor tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat keberlanjutan program pembangunan karena masyarakat tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut (Banks et al., 2020). Selain itu, ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan informasi juga menjadi hambatan serius dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan (Kaplinsky & Kraemer-Mbula, 2022).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan masyarakat. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagian besar masyarakat pedesaan masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya sebagai sumber penghidupan utama. Namun, praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan berbagai kerusakan ekologis seperti deforestasi, degradasi lahan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Perubahan iklim global juga memperburuk kondisi tersebut dengan meningkatkan frekuensi bencana alam, ketidakpastian musim tanam, serta menurunnya produktivitas pertanian (IPCC, 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, karena kerusakan ekosistem secara langsung mempengaruhi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.

Selain tantangan ekologis, dimensi sosial dan politik juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Praktik patronase politik, lemahnya tata kelola pemerintahan lokal, serta ketimpangan distribusi kekuasaan sering kali menjadi faktor penghambat dalam implementasi program pembangunan yang efektif dan inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa sistem patronase dalam politik lokal dapat mengurangi transparansi kebijakan publik

dan menciptakan distribusi sumber daya yang tidak merata (Aspinall & Berenschot, 2019). Di sisi lain, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan eksternal juga dapat menciptakan fenomena dependency trap, di mana masyarakat menjadi kurang mandiri dalam mengembangkan potensi lokal yang mereka miliki (Banks et al., 2020). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan struktural tersebut.

Dalam literatur pembangunan sosial, konsep pemberdayaan masyarakat (community empowerment) berkembang sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengontrol keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis atau ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran kritis, kepercayaan diri, serta kemampuan kolektif dalam mengakses dan mengelola sumber daya (Perkins & Zimmerman, 1995). Pendekatan ini berakar pada pemikiran pendidikan kritis yang menekankan pentingnya proses pembebasan manusia dari struktur sosial yang menindas melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat (Freire, 1970). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan proses transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan sosial mereka sendiri (Adamowicz, 2022; Zhironkin & Cehlár, 2022).

Seiring dengan perkembangan kajian pembangunan masyarakat, berbagai pendekatan inovatif telah dikembangkan untuk memperkuat proses pemberdayaan komunitas. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pengambilan keputusan dalam proses pembangunan. Chambers (1997) menegaskan bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang sangat berharga mengenai kondisi lingkungan dan sosial mereka, sehingga keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan program pembangunan. Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi konsep asset-based community development (ABCD) yang menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari potensi dan aset yang dimiliki oleh komunitas, bukan dari kekurangan atau masalah yang mereka hadapi (Kretzmann & McKnight, 1993). Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kapasitas sosial komunitas serta memperkuat solidaritas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal (Mathie & Cunningham, 2018).

Selain pendekatan sosial partisipatif, integrasi antara pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan juga menjadi fokus penting dalam penelitian pembangunan kontemporer. Dalam sektor pertanian, praktik agroforestri telah diakui sebagai salah satu pendekatan yang mampu menggabungkan peningkatan produktivitas ekonomi dengan konservasi lingkungan. Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman pertanian dengan pohon berkayu sehingga menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan produktif (Leakey, 2012). Penelitian menunjukkan bahwa sistem agroforestri mampu meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi, serta menyediakan sumber pendapatan yang lebih beragam bagi masyarakat pedesaan (Mbow et al., 2019). Di Indonesia, implementasi agroforestri juga terbukti mampu memulihkan lahan kritis sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal (Wahyudi & Supriyanto, 2021).

Dalam sektor kehutanan, pendekatan community-based forest management dan kebijakan perhutanan sosial menjadi inovasi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Kebijakan ini memberikan hak kelola kepada masyarakat terhadap kawasan hutan dalam jangka waktu tertentu sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa program perhutanan sosial mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat deforestasi di beberapa wilayah (KLHK, 2023; Wahyudi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.

Perkembangan terbaru dalam kajian pembangunan masyarakat juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap integrasi teknologi digital dalam pembangunan desa. Transformasi digital membuka peluang baru bagi masyarakat pedesaan untuk mengakses informasi, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperluas jaringan pemasaran produk lokal. Program desa digital yang berkembang di berbagai negara menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat daya saing ekonomi lokal (UN ESCAP, 2022). Namun demikian, implementasi digitalisasi di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, serta kesenjangan akses terhadap teknologi informasi (Yunita & Maulana, 2021).

Selain transformasi teknologi, isu inklusivitas juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan masyarakat. Keterlibatan kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat adat terbukti memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam aktivitas ekonomi dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga serta memperkuat ekonomi lokal (UN Women, 2022). Sementara itu, keterlibatan generasi muda dalam inovasi sosial dan kewirausahaan dapat mendorong transformasi ekonomi desa yang lebih dinamis (ILO, 2020). Di sisi lain, pengetahuan ekologis tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lokal (Berkes, 2018).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas berbagai pendekatan dalam pengembangan masyarakat, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Banyak penelitian yang hanya fokus pada aspek sosial pemberdayaan masyarakat, sementara penelitian lain lebih menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, transformasi digital, atau pembangunan ekonomi desa secara terpisah. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan dalam memahami bagaimana berbagai pendekatan tersebut dapat diintegrasikan secara sistematis dalam satu kerangka pembangunan masyarakat yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, kajian yang menghubungkan antara pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi hijau, bioekonomi, serta transformasi digital desa dalam konteks pembangunan berkelanjutan juga masih relatif terbatas dalam literatur akademik.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang penting untuk diisi. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan sosial yang terpisah dari dimensi ekologis, teknologi, dan ekonomi berkelanjutan. Padahal, tantangan

pembangunan masyarakat saat ini semakin kompleks dan saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan integratif yang mampu menghubungkan berbagai dimensi pembangunan secara simultan. Tanpa integrasi tersebut, berbagai program pemberdayaan masyarakat berpotensi menjadi tidak efektif dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, serta disrupsi teknologi.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengembangkan kerangka analisis yang mengintegrasikan berbagai pendekatan pembangunan masyarakat, termasuk pemberdayaan sosial, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, transformasi digital desa, serta penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana pembangunan masyarakat dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Urgensi penelitian ini semakin relevan dalam konteks perubahan global yang semakin kompleks. Krisis iklim, ketidakpastian ekonomi global, serta percepatan perkembangan teknologi telah menciptakan tantangan baru bagi masyarakat pedesaan di berbagai negara berkembang. Tanpa strategi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan, masyarakat pedesaan berisiko semakin tertinggal dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana berbagai pendekatan pembangunan masyarakat dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem pembangunan yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep, prinsip, serta model implementasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji perkembangan konsep dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat; (2) menganalisis berbagai model pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan; serta (3) merumuskan kerangka integratif pengembangan masyarakat yang mampu memperkuat peran komunitas sebagai aktor utama dalam pembangunan yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

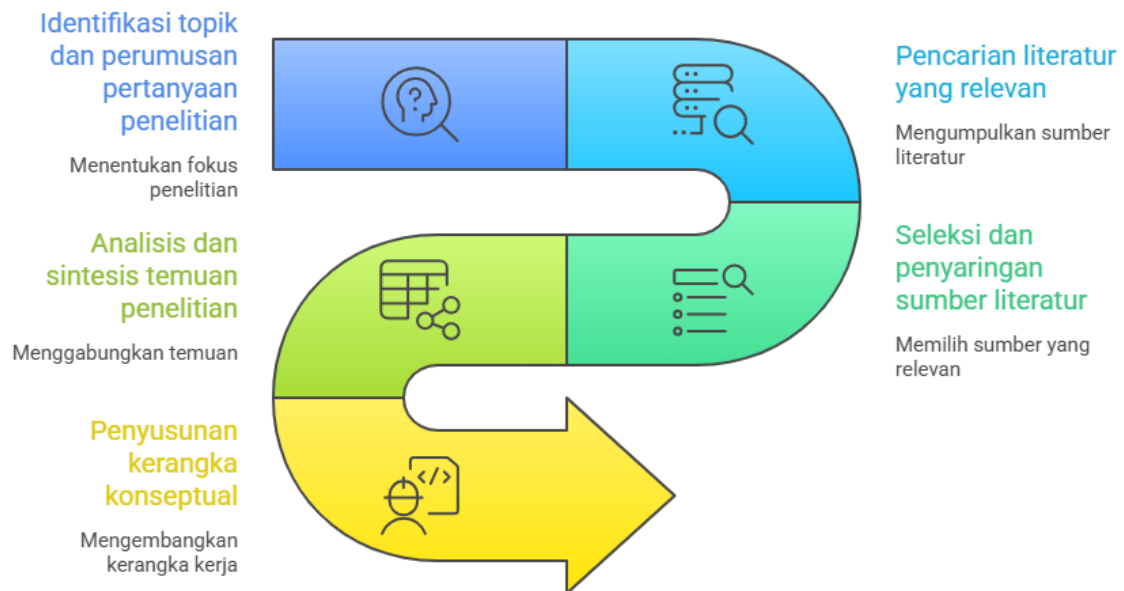
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara komprehensif berbagai konsep, teori, serta model implementasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pendekatan literature review dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi perkembangan konsep, serta menemukan kesenjangan penelitian yang masih terbuka dalam kajian pengembangan masyarakat. Melalui analisis literatur yang sistematis, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif mengenai integrasi pendekatan sosial, ekonomi, ekologis, dan teknologi dalam pembangunan berbasis masyarakat.

Desain Penelitian

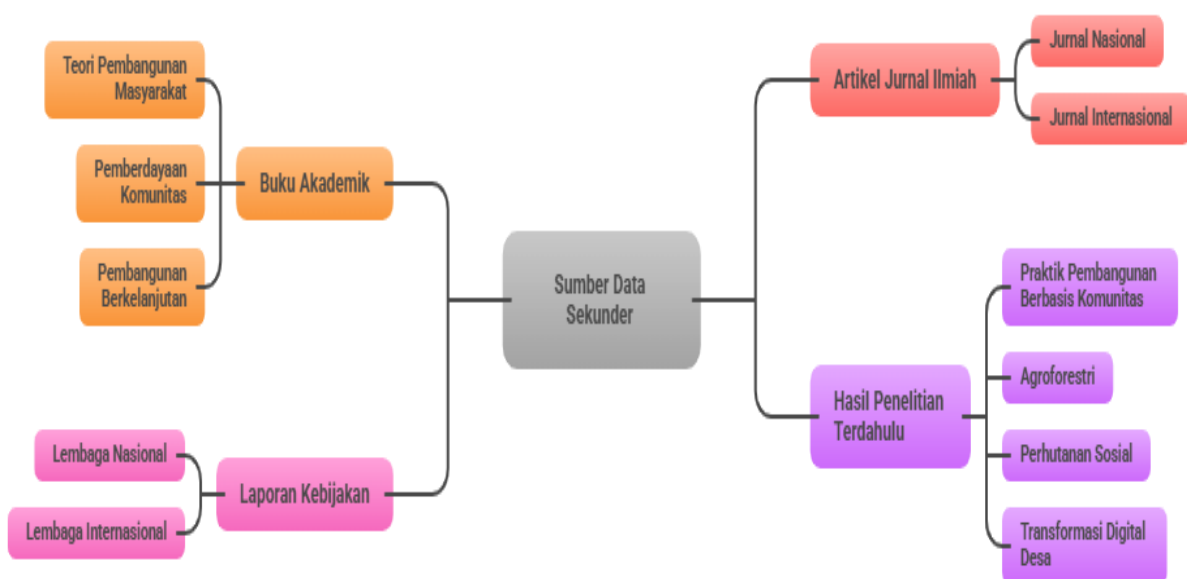
Penelitian ini menggunakan desain narrative literature review yang terstruktur dengan tahapan yang meliputi: (1) identifikasi topik dan perumusan pertanyaan

penelitian, (2) pencarian literatur yang relevan, (3) seleksi dan penyaringan sumber literatur berdasarkan kriteria tertentu, (4) analisis dan sintesis temuan penelitian, serta (5) penyusunan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara berbagai pendekatan pembangunan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara kritis berbagai perspektif teoretis dan empiris yang telah berkembang dalam literatur akademik terkait pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Desain penelitian disajikan pada gambar 1



Gambar 1. Tahapan desain literature review

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan data dalam penelitian disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Sumber data penelitian

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang memiliki kredibilitas akademik tinggi, seperti penerbit buku ilmiah, jurnal internasional bereputasi, serta laporan resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional.

Strategi Pencarian Literatur

Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan berbagai basis data ilmiah dan sumber referensi akademik. Beberapa basis data yang digunakan antara lain Google Scholar, Scopus, Web of Science, dan portal jurnal nasional. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Proses pencarian literatur dilakukan secara bertahap untuk memperoleh sumber referensi yang relevan dan mutakhir. Literatur yang dipilih terutama merupakan publikasi dalam rentang waktu 10–20 tahun **terakhir**, meskipun beberapa karya klasik tetap digunakan sebagai landasan teoretis utama dalam kajian pembangunan masyarakat.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk memastikan kualitas dan relevansi literatur yang dianalisis, penelitian ini menerapkan beberapa kriteria seleksi sumber literatur, yaitu:

1. Kriteria inklusi

1. Literatur yang membahas konsep atau praktik pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penelitian yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, atau pembangunan desa.
3. Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik atau buku yang memiliki kredibilitas ilmiah.
4. Literatur yang memberikan kontribusi teoretis maupun empiris terhadap pengembangan model pembangunan masyarakat.

2. Kriteria eksklusi

1. Literatur yang tidak memiliki relevansi langsung dengan topik pengembangan masyarakat.
2. Artikel yang tidak melalui proses penelaahan ilmiah (non-peer reviewed).
3. Publikasi yang bersifat opini tanpa dasar penelitian yang jelas.

Melalui proses seleksi ini, diperoleh sejumlah literatur utama yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendukung kerangka konseptual penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terhadap berbagai sumber literatur yang telah dipilih. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Klasifikasi literatur berdasarkan tema utama seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan transformasi digital desa.
2. Identifikasi konsep dan teori utama yang digunakan dalam kajian pembangunan masyarakat.

3. Perbandingan temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan pendekatan dalam praktik pembangunan berbasis komunitas.
4. Sintesis temuan penelitian untuk merumuskan kerangka analisis yang lebih komprehensif mengenai model pengembangan masyarakat berkelanjutan.

Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dan empiris sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pembangunan masyarakat.

Sintesis Literatur

Tahap akhir penelitian ini adalah melakukan sintesis literatur untuk merumuskan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara berbagai pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai penelitian yang membahas pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi hijau, serta transformasi digital desa. Melalui proses ini, penelitian ini berupaya mengidentifikasi model pembangunan masyarakat yang lebih integratif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan literature review yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang lebih kuat dalam pengembangan kajian pembangunan masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan sosial modern, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, konsep pengembangan masyarakat semakin bergeser dari pendekatan top-down menuju pendekatan partisipatif dan transformatif, di mana masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama dalam menciptakan perubahan (Chambers, 1997; Ife, 2013). Pergeseran paradigma ini didorong oleh munculnya kritik terhadap kebijakan pembangunan masa lalu yang terbukti gagal mengatasi ketimpangan sosial, ketergantungan ekonomi, dan degradasi lingkungan (Korten, 1987). Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembangunan hanya dapat berhasil apabila melibatkan masyarakat secara penuh dan memberikan mereka kendali dalam pengelolaan sumber daya lokal (Midgley, 2010; Kenny, 2017).

Konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sendiri didefinisikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok dalam mengontrol keputusan yang memengaruhi hidup mereka (Perkins & Zimmerman, 1995). Dalam konteks ini, pemberdayaan bukan hanya persoalan meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan kesadaran kritis, rasa percaya diri, kapasitas kolektif, serta kemampuan mengakses hak-hak dasar (Freire, 1970). Penelitian oleh Narayan (2005) menegaskan bahwa pemberdayaan menuntut adanya transformasi pada tingkat struktural – misalnya akses legal atas lahan, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, serta penataan ulang relasi kekuasaan dalam komunitas.

Penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya terbukti menjadi salah satu faktor paling penting dalam pengembangan masyarakat. Studi oleh Larson et al. (2019) menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberi hak legal untuk mengelola hutan dan lahan pertanian, mereka lebih mampu meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi. Temuan ini sejalan dengan kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia yang memberi masyarakat hak kelola hingga 35 tahun. Evaluasi terbaru KLHK (2023) mengungkapkan bahwa program ini menurunkan angka deforestasi hingga 30% di wilayah yang dikelola masyarakat. Ini membuktikan bahwa kepercayaan pemerintah kepada komunitas lokal menghasilkan dampak ekologis dan ekonomi yang signifikan. Pentingnya pendekatan berbasis potensi atau *asset-based community development* (ABCD) juga semakin diperkuat oleh penelitian. Model ABCD menekankan bahwa pembangunan harus bertolak dari kekuatan dan potensi yang dimiliki komunitas – bukan kekurangannya (Kretzmann & McKnight, 1993). Studi empiris oleh Mathie & Cunningham (2018) menunjukkan bahwa wilayah pedesaan yang menerapkan ABCD mengalami peningkatan kapasitas lokal dan solidaritas sosial yang lebih kuat dibanding wilayah yang hanya menerima intervensi berbasis bantuan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ekologis seperti kerusakan hutan, perubahan iklim, dan degradasi tanah menjadikan pengembangan masyarakat berbasis lingkungan sebagai kebutuhan mendesak. Laporan IPCC (2023) menyebutkan bahwa masyarakat agraris termasuk kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama karena bergantung pada cuaca, tanah, dan air yang stabil. Ketika pola hujan berubah, musim tanam menjadi tidak menentu, dan suhu meningkat, produksi pertanian menurun drastis. Oleh sebab itu, pendekatan pembangunan berbasis ketangguhan (*resilience-based development*) menjadi sangat penting diterapkan. Dalam bidang pertanian, agroforestri dan pertanian organik berkembang sebagai praktik unggulan yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Agroforestri, yang memadukan tanaman pertanian dengan pohon berkayu, menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan produktif (Leakey, 2012). Penelitian Mbow et al. (2019) menunjukkan bahwa agroforestri mampu meningkatkan cadangan karbon, menjaga kelembapan tanah, dan memberikan pendapatan berlapis bagi petani. Di Indonesia, implementasi agroforestri pada kawasan Gunung Kidul terbukti berhasil memulihkan lahan kritis dan meningkatkan pendapatan petani secara signifikan (Wahyudi & Supriyanto, 2021).

Pertanian organik juga menjadi strategi penting dalam pemberdayaan petani. Studi oleh Altieri (2020) menunjukkan bahwa pertanian organik meningkatkan biodiversitas tanah hingga 30% lebih tinggi dibanding sistem konvensional serta menghasilkan sistem pangan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Di Bali, kelompok petani organik mampu meningkatkan nilai ekonomi produk mereka melalui pariwisata dan pasar premium (Mulyani et al., 2019). Dalam bidang kehutanan, model *community-based forest management* (CBFM) telah diterapkan di berbagai negara seperti Nepal, India, dan Filipina. Studi Pagdee et al. (2006) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepastian hak atas tanah, aturan internal yang jelas, serta dukungan pemerintah. Contoh serupa terlihat di Kalimantan Tengah melalui Hutan Desa, di

mana masyarakat menjaga kawasan hutan sekaligus memanfaatkan produk non-kayu seperti madu dan minyak atsiri (Nurhayati & Santoso, 2021).

Ekowisata berbasis komunitas menjadi strategi yang menggabungkan pelestarian ekologi dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian Stronza & Durham (2020) membuktikan bahwa ekowisata meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi praktik eksploitasi sumber daya. Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta adalah contoh sukses model ini, dengan pengelolaan kolektif dan pelestarian budaya lokal yang mendapat pengakuan internasional. Transformasi digital membawa babak baru dalam pengembangan masyarakat. Desa kini memasuki era *digital rural transformation*, di mana akses informasi, teknologi, dan pemasaran online menjadi kebutuhan utama. Menurut United Nations ESCAP (2022), digitalisasi UMKM desa meningkatkan pendapatan hingga 45%. Indonesia mengembangkan “desa digital”, “smart village”, dan digitalisasi BUMDes untuk membuka peluang ekonomi baru. Namun, digitalisasi menghadapi hambatan seperti kesenjangan akses internet dan rendahnya literasi digital (Yunita & Maulana, 2021). Oleh sebab itu, pembangunan desa harus memasukkan edukasi digital sebagai pilar utama.

Gender juga menjadi isu penting. Pemberdayaan perempuan terbukti mempengaruhi ketahanan pangan, kesehatan keluarga, dan ekonomi lokal. UN Women (2022) melaporkan bahwa peningkatan 10% akses perempuan pada aset produktif meningkatkan ketahanan pangan desa hingga 7%. Studi Suryani (2021) menunjukkan bahwa perempuan pengolah pangan lokal mampu menjadi motor ekonomi desa. Model *gender-transformative development* perlu diadopsi agar pembangunan tidak sekadar melibatkan perempuan tetapi mengubah norma yang diskriminatif (CARE, 2020). Peran pemuda sama pentingnya. ILO (2020) melaporkan bahwa program wirausaha pemuda mengurangi migrasi desa-kota hingga 18% dan mendorong tumbuhnya inovasi desa seperti pertanian hidroponik, kopi lokal, dan bisnis digital. Gerakan “Pemuda Tani Milenial” dan “Startup Desa” membuktikan bahwa generasi muda dapat mentransformasi desa menjadi lebih adaptif dan berdaya saing. Khusus masyarakat adat, pengetahuan ekologis tradisional (*indigenous ecological knowledge*) merupakan aset besar. Sistem sasi di Maluku, awig-awig Bali, dan hutan adat Dayak membuktikan bahwa aturan adat mampu menjaga kelestarian lingkungan (Berkes, 2018). Pengakuan Hutan Adat pasca putusan MK 35/2012 merupakan momen penting bagi pembangunan berbasis hak.

Agenda pembangunan global seperti SDGs juga memengaruhi arah pembangunan desa. Indonesia menerjemahkannya menjadi SDGs Desa dengan 18 indikator spesifik, seperti Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Peduli Lingkungan, dan Desa Berenergi Bersih. Hidayat et al. (2022) mencatat bahwa desa yang memasukkan SDGs dalam RPJMDes memiliki efektivitas pembangunan lebih tinggi. Namun, McGregor (2021) memperingatkan bahwa SDGs dapat bersifat teknokratis jika tidak dibarengi pendidikan warga. Ekonomi hijau (*green economy*) dan bioekonomi menjadi peluang besar bagi desa. Produk seperti minyak atsiri, madu, rotan, dan herbal memiliki pasar internasional tinggi. Bugge et al. (2022) mencatat bahwa desa dengan bioekonomi berbasis komunitas mengalami peningkatan pendapatan 2–4 kali lipat. Program Perhutanan Sosial mendukung ini; penelitian Wahyudi et al. (2023) menunjukkan peningkatan pendapatan 27% setelah dua tahun.

Selain ekonomi, ketahanan sosial (*social resilience*) merupakan pilar penting. Aldrich (2012) menegaskan bahwa komunitas dengan modal sosial kuat pulih lebih

cepat dari bencana. Contoh serupa ditemukan di Sulawesi Tengah pada pasca likuifaksi (Lestari & Satria, 2021). Karena itu, pembangunan desa harus menekankan solidaritas sosial, sistem peringatan dini, jejaring relawan, dan diversifikasi ekonomi (BNPB, 2022). Tantangan struktural seperti korupsi, patronase politik, dan konflik lahan sering menghambat pembangunan. Aspinall & Berenschot (2019) menunjukkan bahwa patronase mengurangi transparansi anggaran desa. Penyelesaiannya adalah mekanisme akuntabilitas sosial: audit masyarakat, musyawarah desa terbuka, dan pemantauan proyek berbasis komunitas. Ketergantungan pada bantuan eksternal juga menjadi perangkap (*dependency trap*). Banks et al. (2020) menegaskan bahwa program berbasis bantuan cenderung rapuh karena masyarakat tidak memiliki rasa kepemilikan. Rahayu (2020) menemukan bahwa bantuan usaha menjadi efektif jika dikombinasikan dengan pelatihan dan pendampingan.

Diaspora desa menjadi aktor baru dalam pembangunan. Hoang (2018) menemukan bahwa remitansi diaspora mampu memicu investasi desa apabila diarahkan produktif. Di Indonesia, gerakan “Ayo Pulang Kampung” menunjukkan bahwa diaspora dapat membawa inovasi dan modal sosial yang besar. Perubahan iklim juga menjadi ancaman besar bagi desa. IPCC (2023) memperingatkan 100 juta orang di Asia Tenggara berpotensi terdampak kemiskinan karena iklim ekstrem. Karena itu, desa harus mengadopsi *climate-resilient development*: mangrove, energi surya, mikrohidro, konservasi air, diversifikasi pangan, dan agroekologi modern (Suharto & Sari, 2022). Setelah menelaah seluruh dinamika ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses panjang yang membutuhkan integrasi antara struktur sosial, budaya, teknologi, ekonomi, ekologi, dan politik. Pembangunan tidak cukup hanya membangun infrastruktur, tetapi harus membangun manusia, modal sosial, kelembagaan, kapasitas adaptif, dan kemandirian. Keberhasilan pembangunan masyarakat dapat dilihat ketika masyarakat:

1. mampu mengidentifikasi masalah dan merencanakan solusi sendiri,
2. memiliki akses terhadap sumber daya, pasar, dan teknologi,
3. menjaga lingkungannya secara berkelanjutan,
4. memiliki kepemimpinan dan kelembagaan yang kuat,
5. mampu beradaptasi terhadap krisis dan perubahan,
6. memiliki solidaritas sosial yang tinggi.

Pembangunan semacam ini hanya mungkin terjadi apabila prinsip partisipasi, keadilan sosial, kemandirian, pelestarian lingkungan, dan penghargaan terhadap identitas lokal dijadikan fondasi. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukanlah sekadar program, melainkan proses transformasi sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat. Ketika masyarakat diberi ruang, hak, kapasitas, dan kepercayaan, mereka mampu menciptakan pembangunan yang jauh lebih kuat, adil, dan berkelanjutan daripada pembangunan yang dipaksakan dari luar.

KESIMPULAN

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan proses transformatif yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama pembangunan. Berbagai teori dan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas sosial, kelembagaan lokal, kearifan budaya, serta keberlanjutan ekologis. Ketika masyarakat diberi akses legal terhadap sumber daya, terlibat penuh dalam pengambilan keputusan, dan

memperoleh pendampingan berkualitas, mereka mampu menciptakan perubahan signifikan dalam kesejahteraan, ketahanan sosial, serta kelestarian lingkungan.

Pembangunan desa yang efektif harus bersifat partisipatif, inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal. Integrasi teknologi digital, ekonomi hijau, bioekonomi, dan penguatan modal sosial terbukti mampu memperkuat daya saing desa dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketimpangan ekonomi. Pengalaman di berbagai daerah dan negara menunjukkan bahwa pembangunan berbasis masyarakat menghasilkan dampak lebih berkelanjutan dibanding intervensi top-down yang tidak melibatkan warga secara aktif. Secara keseluruhan, pengembangan masyarakat yang ideal adalah pembangunan yang memanusiakan manusia pembangunan yang menghargai martabat, identitas budaya, dan kapasitas sosial, sekaligus menciptakan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, diperlukan langkah strategis untuk memastikan pengembangan masyarakat berjalan efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, beberapa saran berikut disusun sebagai arahan penguatan agar pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

1. Penguatan Kelembagaan Lokal
Desa perlu memperkuat lembaga seperti BUMDes, kelompok tani, kelompok perempuan, dan lembaga adat agar mampu mengelola potensi lokal secara mandiri. Dukungan pemerintah dan akademisi diperlukan dalam bentuk pelatihan manajemen, tata kelola, dan pemasaran.
2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Program pendidikan nonformal seperti literasi digital, literasi keuangan, manajemen usaha, mitigasi bencana, dan pelatihan wirausaha harus diperluas agar masyarakat memiliki kompetensi adaptif menghadapi perubahan zaman.
3. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal mengembangkan sektor potensial seperti agroforestri, pertanian organik, ekowisata, produk kreatif, dan bioekonomi agar masyarakat memperoleh pendapatan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
4. Percepatan Transformasi Digital di Desa
Pemerintah dan sektor swasta harus memberikan akses internet berkualitas, pelatihan digital, serta dukungan pemasaran online agar UMKM desa mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
5. Penguatan Perlindungan Lingkungan
Pembangunan desa harus memasukkan prinsip keberlanjutan ekologis: konservasi hutan, pengelolaan air terpadu, energi terbarukan, dan adaptasi perubahan iklim. Pendekatan berbasis masyarakat perlu diperkuat karena terbukti lebih efektif menjaga ekosistem.
6. Penyelarasan Kebijakan dengan SDGs Desa
Pemerintah desa perlu mengintegrasikan SDGs Desa dalam RPJMDes dan memastikan implementasinya melibatkan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat.
7. Pendampingan Berkelanjutan

Pendampingan oleh pekerja pengembangan masyarakat perlu dilakukan secara jangka panjang, tidak hanya saat proyek berjalan. Pendekatan konsisten dan intensif meningkatkan keberhasilan program secara signifikan.

8. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Musyawarah desa, audit sosial, dan pelibatan warga dalam pengawasan anggaran perlu ditingkatkan untuk mencegah korupsi, memperkuat kepercayaan, dan memastikan pembangunan tepat sasaran.

REFERENSI

- Adamowicz, M. (2022). Green Deal, Green Growth and Green Economy as a Means of Support for Attaining the Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 14(10), 5901. <https://doi.org/10.3390/su14105901>
- Aldrich, D. P. (2012). *Building Resilience: Social Capital In Post-Disaster Recovery*. University Of Chicago Press.
- Altieri, M. A. (2020). *Agroecology: The Science Of Sustainable Agriculture*. CRC Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale: Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*. Cornell University Press.
- Banks, N., Hulme, D., & Edwards, M. (2020). Ngos, States, And Donors: Still Too Close For Comfort? *World Development*, 138, 105184.
- Berkes, F. (2018). *Sacred Ecology (4th Ed.)*. Routledge.
- BNPB. (2022). *Indeks Ketahanan Desa Dan Masyarakat Terhadap Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Bugge, M. M., Hansen, T., & Klitkou, A. (2022). What Is The Bioeconomy? A Review Of The Literature. *Sustainability*, 14(9), 5222.
- CARE. (2020). *Gender Transformative Impact: Measurement And Analysis Guide*. CARE International.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting The First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Carmen, E., Fazey, I., Ross, H., Bedinger, M., Smith, F. M., Prager, K., McClymont, K., & Morrison, D. (2022). Building community resilience in a context of climate change: The role of social capital. *Ambio*, 51(6), 1371–1387. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01678-9>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy Of The Oppressed*. Continuum.
- Hidayat, A., Suryani, D., & Mahda, D. (2022). Implementasi Sdgs Desa Dalam Rpjmdes Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Desa*, 7(2), 113–129.
- Hirvilammi, T. (2020). The Virtuous Circle Of Sustainable Well-Being: A Transformative Policy Approach. *Futures*, 120, 102552.
- Handoko, W., Soerjadjanegara, M., Irawati, I., & Suwarno, S. (2023). Enhancing Community Participation for Sustainable Coastal Empowerment: A Case Study of the Resilient Coastal Area Development Program in Central Java. *Research Horizon*, 3(4), 378–390. <https://doi.org/10.54518/rh.3.4.2023.147>
- Hoang, L. A. (2018). Transnational Migration And Development In Southeast Asia. *Migration Studies*, 6(2), 225–245.
- ILO. (2020). *Global Employment Trends For Youth*. International Labour Organization.
- Ife, J. (2013). *Community Development In An Uncertain World*. Cambridge University Press.

- IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Impacts, Adaptation And Vulnerability*. Cambridge University Press.
- Kaplinsky, R., & Kraemer-Mbula, E. (2022). Innovation and uneven development: The challenge for low- and middle-income economies. *Research Policy*, 51(2), 104394. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104394>
- Kenny, S. (2017). *Developing Communities For The Future*. Cengage Learning.
- Korten, D. (1987). *Community Management: Asian Experience And Perspectives*. Kumarian Press.
- Kretzmann, J. P., & Mcknight, J. (1993). *Building Communities From The Inside Out: A Path Toward Finding And Mobilizing A Community's Assets*. ACTA Publications.
- KLHK. (2023). *Laporan Evaluasi Perhutanan Sosial 2022/2023*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Larson, A. M., Et Al. (2019). Forest Tenure Reforms: Enhancing Equity And Sustainability. *World Development*, 120, 143–157.
- Leakey, R. R. B. (2012). *Living With The Trees Of Life: Towards The Transformation Of Tropical Agriculture*. CABI.
- Lestari, M., & Satria, A. (2021). Resiliensi Sosial Pasca Bencana: Studi Kasus Likuifaksi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 12(1), 27–42.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2018). *From Clients To Citizens: Communities Changing The Course Of Their Own Development*. Practical Action Publishing.
- Mbow, C., Rosenzweig, C., & Barioni, L. Et Al. (2019). Agroforestry As A Solution To Climate Change: Opportunities And Challenges. *Current Opinion In Environmental Sustainability*, 41, 45–51.
- Mcgregor, A. (2021). Rethinking The Sustainable Development Goals. *Development And Change*, 52(4), 771–792.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective In Social Welfare*. SAGE.
- Midgley, J. (2010). *Community Practice And Social Development*. Oxford University Press.
- Mulyani, S., Astuti, N., & Yasa, I. (2019). Pertanian Organik Berbasis Komunitas Dan Pariwisata Di Bali. *Jurnal Agroekologi Indonesia*, 5(3), 122–135.
- Narayan, D. (2005). *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives*. The World Bank.
- Nurhayati, S., & Santoso, H. (2021). Model Pengelolaan Hutan Desa Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Kehutanan Tropika*, 9(1), 15–26.
- Pagdee, A., Kim, Y. S., & Daugherty, P. J. (2006). What Makes Community Forest Management Successful? *Society & Natural Resources*, 19(1), 33–52.
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment Theory, Research, And Application. *American Journal Of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
- Raharjo, B., & Kusmulyono, S. (2021). Pendekatan ABCD Dalam Pemberdayaan Komunitas Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 45–56.
- Rahayu, N. (2020). Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Jika Dikombinasikan Dengan Pendampingan. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 19(2), 88–104.
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. Oxford University Press.

- Stronza, A., & Durham, W. (2020). *Ecotourism And Conservation In The Americas*. CABI.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E., & Sari, R. (2022). Pendekatan Climate-Resilient Village Untuk Ketahanan Komunitas. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(2), 55–69.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Suryani, L. (2021). Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Gender Dan Pembangunan*, 9(1), 34–51.
- UN ESCAP. (2022). *Digital Transformation Of Rural Communities In Asia-Pacific*. United Nations.
- UN Women. (2022). *Women And Sustainable Rural Development*. United Nations.
- Wahyudi, A., & Supriyanto, B. (2021). Agroforestri Sebagai Solusi Pemulihan Lahan Kritis Di Gunungkidul. *Jurnal Ilmu Kehutanan Indonesia*, 13(2), 78–93.
- Wahyudi, A., Et Al. (2023). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. *Forest Policy And Economics*, 146, 102880.
- Yunita, N., & Maulana, R. (2021). Hambatan Transformasi Digital Desa Di Indonesia. *Jurnal Teknologi & Masyarakat*, 5(1), 12–25.
- Zhironkin, S., & Cehlár, M. (2022). Green Economy and Sustainable Development: The Outlook. *Energies*, 15(3), 1167. <https://doi.org/10.3390/en15031167>